

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **1. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pada bagian ini akan diuraikan dan dibahas mengenai hasil temuan-temuan yang telah dideskriptifkan pada bagian deskripsi hasil penelitian. kemudian temuan-temuan tersebut di analisis dan dikuatkan dengan teori-teori yang menjadi landasan pustaka, dan penguatan dari wawancara dengan Pakar PKN.

##### **1. Pendidikan politik menurut elite politik.**

###### **a. Arti penting Pendidikan Politik**

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, pendidikan politik oleh partai politik lebih banyak dilakukan untuk para kadernya, kepentingan mereka akan pendidikan politik adalah untuk menjaga konstituen mereka agar mereka terpilih lagi diperiode berikut. Dengan pendidikan politik diharapkan para kader memiliki kemampuan komunikasi politik dalam berkampanye, menyampaikan visi misi partai, kebijakan partai politik demi keberlangsungan partai politik.

Menjadi seorang anggota Legislatif adalah sebuah jabatan politik, sebuah profesional dalam dunia politik, semua yang terlibat dalam partai politik bercita-cita menjadi anggota legislatif. sudah selayaknya keinginan profesional dalam politik itu mendapatkan pendidikan politik ini sejalan dengan pendapat Haines.

Menurut Haines bahwa: Pendidikan politik adalah bagaimana mengembangkan keinginan profesional dalam politik dan mengutamakan yang mengarah kepada tanggungjawab politik, yang dalam waktu yang sama berusaha memberikan kepada mereka pengetahuan yang penting dan keterampilan untuk melaksanakan tanggungjawab (Idrus Affandi, 1993:5).

Terkait dengan elite politik dan pendidikan politik, menurut Haines elite politik perlu mendapatkan pendidikan politik yang mengarah kepada tanggungjawab politik. Tanggung jawab politik adalah tanggung jawab terhadap tugas, fungsi dan wewenangnya. Mereka tidak boleh seenaknya menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Mayoritas

elite politik menggunakan politik sebagai teknik. *How to get power, how to use power, how to defeat other friends*, bagaimana mengalahkan bagaimana mendapatkan kekuasaan. Seharusnya elite politik menggunakan politik sebagai etik itulah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dilupakan karena kita tergilagila dengan konsep demokrasi liberal “*one man one vote*” dalam budaya Pancasila kita tidak mengenal *one man one vote*. Sila keempat tidak mendorong *one man one vote*. Melalui pendidikan politik, elite politik dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan tanggungjawabnya, sehingga mengedepankan politik sebagai etik bukan politik sebagai teknik.

Berbicara tanggung jawab, terdapat macam-macam tanggung jawab. Sesuai eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu dan makhluk sosial maka tanggung jawab dapat dibedakan menjadi, 1) tanggung jawab terhadap diri sendiri, 2) tanggung jawab terhadap keluarga, 2) tanggung jawab terhadap masyarakat dan 4) tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dengan tanggung jawabnya itu tindakan manusia terkontrol.

Kesadaran tentang tanggung jawab ini seharusnya diberikan kepada para elite politik sehingga mereka menggunakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat.

Pendidikan politik memiliki arti penting bagi pemerintah maupun partai politik itu sendiri. Namun pendidikan politik jangan hanya menjadi monopoli para elite politik, masyarakatpun harus mendapatkan pendidikan politik yang proporsional. Melalui pendidikan politik masyarakat akan sadar tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehinggamelalui pendidikan politik pemerintah akan mendapat dukungan dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pembangunan. Sebagai contoh pendidikan politik di desa bagaimana masyarakat desa bergotong royong dalam pembangunan desa.

Bagi partai politik melalui pendidikan politik versi mereka, mereka akan kuat karena mendapat dukungan dari rakyat melalui hak suaranya. Melalui pendidikan politik rakyat akan sadar hak dan tanggung jawabnya sebagai warga

negara sehingga mereka tidak akan menyalahgunakan hak suaranya. Sehingga akan menekan angka golput. Karena partisipasi rakyat akan menentukan arah dan tujuan bangsa dan negara Indonesia untuk masa yang akan datang.

Berbicara penyelenggaraan pendidikan politik di negara kita belum maksimal. Sebagai salah satu fungsi dari partai politik, partai politik belum dapat menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat secara optimal. Mereka lebih terkonsentrasi memberikan pendidikan politik kepada kader-kader mereka. Karena mereka menganggap keberlangsungan partai politik tergantung pada ketersediaan kader yang berkualitas. Sedangkan pendidikan politik untuk masyarakat mereka hanya menjalankannya ketika akan ada pemilu, pileg, atau pilgub, pilbup dan pilwalkot. Dan itu pun dalam bentuk kampanye-kampanye politik, yang tidak bermuatan pendidikan, yang tujuannya adalah bagaimana supaya masyarakat jangan golput dan menggunakan hak suaranya untuk memilih partai politik mereka.

Pemerintahan yang demokratis menurut Kokotiasa (2012) seharusnya memandang pentingnya rakyat melek secara politik. Rakyat harus dijadikan mitra yang aktif dalam usaha pembangunan politik. Rakyat yang mandiri justru akan mengurangi beban pemerintahan. Karena itu lembaga politik dan partai politik seharusnya mengatur semua aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat. *Output* dari pendidikan politik adalah terbentuknya pribadi yang demokratis dan bertanggungjawab. Selain itu akan menghasilkan demokratisasi struktur-struktur kemasyarakatan untuk mencapai komunitas sosial politik yang adil dan sejahtera. Ringkasnya keluaran pendidikan politik adalah perubahan sikap politik rakyat dari sinisme, kepasifan dan apatisme politik beralih menjadi antusiasme politik, kegairahan, partisipasi aktif, inovatif, produktif dan optimisme politik

Menurut UU No 2 tahun 2008 tentang Partai politik pada BAB XIII, pasal 31

### PENDIDIKAN POLITIK

1. Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pendidikan politik tidak bisa lepas dari ideologi Pancasila. Pancasila harus menjadi sumber dan patokan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Menurut Idrus Affandi dalam pengantar bedah buku *Political Education* dari Brownhill

Pendidikan politik adalah merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana. Pelaksanaan pendidikan politik harus berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung, pendidikan politik merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan landasan yang telah mendasari kehidupan bangsa Indonesia (Sadeli, 2009: v).

Menurut Affandi, pendidikan politik adalah bagian integral dari pembangunan bangsa. Oleh karena itu Pancasila harus menjadi dasar dan acuan didalam pelaksanaan pendidikan politik, sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

Menurut Ramlan Surbakti sosialisasi politik adalah:

Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem

politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.( Surbakti, 1999:117)

Dalam pendidikan politik terkandung upaya untuk mengenalkan dan membelajarkan masyarakat tentang nilai-nilai (ideologi Pancasila) dan simbol-simbol politik negara dalam sistem politik yang Pancasila dan demokratis melalui sekolah, pemerintah dan partai politik. Hal di atas sejalan dengan pendapat Wahab dalam Komarudin, (2005:19) yang mengemukakan, bahwa “pendidikan politik secara umum adalah sosialisasi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Kartono mengungkapkan bahwa pendidikan politik ditujukan untuk memantapkan kesadaran politik dan bernegara dalam menunjang kelestarian Pancasila dan UUD NRI tahun 1945:

1. Rangkaian upaya edukatif yang sistematis dan intensional untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran dalam bernegara, dalam menunjang kelestarian Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 sebagai falsafah hidup serta landasan konstitusional.
2. Melakukan upaya pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia, dalam rangka tegaknya satu sistem politik yang demokratis, sehat dan dinamis.(Kartono, 2009:69)

Artinya bahwa dalam pendidikan politik penting sekali diperkenalkan secara sistematis, tidak sepotong-sepotong untuk menghindari pemahaman yang liru tentang politik yang ideal yang sesuai dengan Pancasila yang merupakan kristalisasi dari kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum positif yang ada di Indonesia dan menjadi dasar negara Indonesia.

Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dalam ilmu hukum memiliki kedudukan sebagai “*Staatsfundamentalnorm*”, oleh karena itu merupakan sumber hukum positif dalam negara Republik Indonesia. Maka prinsip demokrasi dalam Negara Indonesia selain tercantum dalam Pembukaan juga berdasarkan pada dasar filsafat negara Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan, yang juga tercantum dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Makna pengertian “dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dimaksud bahwa dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu didasarkan pada moral kebijaksanaan yang

terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab (Kaelan, 2007: 67)

Jadi Pancasila sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 harus menjadi sumber hukum positif bagi suatu negara dan merupakan sesuatu yang amat penting. Dengan kata lain Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Dasar Negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita negara, tujuan negara, norma bernegara.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi pedoman untuk setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan dan tetap memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral bangsa.

Dalam menjalankan salah satu fungsinya partai politik melaksanakan pendidikan politik tidak hanya kepada kader atau elite politik, tetapi juga kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang apa itu Pancasila, apa itu demokrasi Pancasila, apa itu politik bukan hanya kampanye-kampanye politik, yang hanya mengajak untuk memilih partai politik. Masyarakat harus melek politik sehingga ia memiliki kesadaran politik yang akan mendorong partisipasi politik yang berkualitas.

Pendidikan politik jangan diartikan secara sempit. Partai politik harus memahami bahwa pendidikan politik adalah sebuah upaya yang terencana, sistematis dan simultan. Masyarakat diberikan pendidikan politik dengan tujuan salah satunya agar masyarakat melek politik. Jadi pemahaman tujuan pendidikan politik jangan hanya ditujukan kepada partisipasi di dalam pemilu. Hal seperti itu adalah sikap egois, hanya pintar untuk sendiri.

Menurut Idrus Affandi dalam pengantar bedah buku *Political Education* dari Brownhill

Pendidikan politik adalah merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana. Pelaksanaan pendidikan politik harus berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung, pendidikan politik merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan landasan yang telah mendasari kehidupan bangsa Indonesia. (Sadeli, 2009: v)

Fungsi pendidikan politik sangat penting dan strategis sebab pendidikan politik adalah upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik agar mendorong kesadaran politik secara maksimal dalam sebuah sistem politik.

Pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama. Pertama, fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yaitu menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. Kedua, lebih luasnya pendidikan politik berfungsi membentuk tatanan masyarakat yang sesuai dengan falsafah bangsa dan negara.

Berbicara pendidikan politik akan erat kaitannya dengan rekrutmen dan sosialisasi. Fungsi pendidikan politik tak lepas dari menjelaskan bagaimana proses rekrutmen dan sosialisasi kepada rakyat agar pahamakan peranannya dalam sistem politik sehingga dapat memiliki orientasi terhadap sistem politik yang berlaku.

Sedangkan fungsi pendidikan politik bagi individu antara lain adalah:

1. Peningkatan kemampuan individual agar setiap individu mampu menghadapi segala tantangan, permasalahan, perubahan sosial yang terjadi. Sehingga mereka dapat bertahan hidup.
2. Ikut serta dalam proses pemilu, baik dipilih maupun memilih, memahami tentang kekuasaan politik serta mekanismenya, dan berpartisipasi aktif mempengaruhi dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan politik di tengah masyarakat, terkait perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik.

Jadi tidak hanya menambah pengetahuan dan pemahaman tentang politik saja. Fungsi pendidikan politik adalah membentuk individu yang aktif berpartisipasi dalam sistem politik yang berlaku sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara.

Menurut Udin S Winataputra, pendidikan politik untuk masyarakat, harus dipahami 1)Politik sebagai seni. 2)Politik sebagai teknik sebagai cara kerja. 3)Politik sebagai etik. Pendidikan politik untuk masyarakat pertama yang harus diajarkan adalah 1)politik sebagai etik, 2)politik sebagai budaya kehidupan, dan terakhir 3) baru politik sebagai teknik. Kita bangun dulu etika berpolitik, sehingga ketika masyarakat berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik sudah terbangun etika berpolitik.

Menurut Udin S Winataputra penyelenggaraan pendidikan politik di Indonesia berjalan sendiri-sendiri. Partai politik, organisasi massa, organisasi profesi mempersepsikan dan menjalankan fungsi pendidikan politiknya sendiri-sendiri. Sehingga terjadikesenjangan persepsi ideologis.

Solusinya 1) Re-Ideologisasi mendorong menggiring mengajak menuntun seluruh komponen bangsa Indonesia, mulai dari individu, organisasi partai politik, ormas, kemudian lembaga swadaya masyarakat kembali ke patokan dasar yaitu ideologi Pancasila, memahami Pancasila seutuhnya. Jangan memahami Pancasila hanya daripengertian struktural kata-kata yang ada pada setiap sila, atau hanya memahami Pancasila terdiri dari lima sila, tetapi kita harus memaknai bahwa jika kita berbicara kemanusiaan maka kemanusiaan yang harus berkeTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang berkesatuan indonesia, kemanusiaan yang mampu hidup berdemokrasi, kemanusiaan yang berkeadilan sosial, jadi sila sila itu harus ditempatkan didalam sentrumnya. Elite politik harus berdemokrasi yang berkeTuhanan. Ketika ia menjalankan *money politics* dengan membayar orang untuk memilih, menurutnya tidak ada orang yang tahu, dia lupa bahwa bagi orang yang berkeTuhanan, mereka percaya ada malaikat yang mencatat perilaku baik dan buruk. Politisi yang berkeTuhanan tidak akan membayar orang untuk

memilihnya. Dia tidak akan berbohong dan mengobral janji yang belum tentu ia capai, ketika ia ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara keadilan sosial tidak akan ada beras yang diselewengkan, minyak yang diselewengkan.

2) Re-Konseptualisasi tugas lembaga negara dan pendidikan tinggi untuk merekonsepsi, mengkonsep ulang apa yang dimaksud pendidikan politik. Sehingga tidak terjadi *miss perception* pendidikan politik.

3) Re-Instrumenisasi, alat-alat dan prasarana ditata ulang. Apakah ceramah-ceramah, pidato, pembelajaran di kelas, tayangan televisi dan sebagainya harus ditata ulang kembali.

4) Re-Praksisasi, membenahi kehidupan nyata. Contoh sederhana, dahulu kota Bandung kacau dan kumuh. Pada masa kekepmimpinan walikota Bandung Ridwan Kamil, walikota Bandung mentata kembali kota Bandung dari kondisi kumuh menjadi indah, Alun-Alun kota Bandung yang semula banyak transaksi seksual dirubah fungsi menjadi tempat silaturahmi. Tindakan yang dilakukan Ridwan Kamil adalah Re-Ideologisasi, bagaimana hidup sebagai orang Bandung. Re-Instrumenisasi membenahi taman-taman kota menjadi indah, setiap orang yang duduk ditaman tidak dicurigai dan tidak malu.

5) Re-Edukasi pendidikan politik, warga dididik untuk melek politik (*political literacy*), tidak harus melalui pendidikan formal di sekolah, tetapi dapat melalui program-program yang inklusif melibatkan seluruh komponen. Contoh mudah dalam kehidupan sehari-hari, buang sampah pada tempatnya, jangan mengandalkan petugas kebersihan pemerintah, jika seluruh warga kota bandung membuang sampah pada tempatnya, *The clean city* akan tercapai. Masing-masing individu mendidik diri sendiri. Dalam bahasa agama adalah *Ibdabinafsih*, dan *fastabiqulkhoirot*, mulai dari diri sendiri dan berlomba-lombalah dalam kebaikan.

#### **b. Media Pendidikan Politik**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para politisi, media yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan politik di Indonesia antara lain, adalah media

massa, pendidikan formal, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan namun semua itu belumlah optimal digunakan.

Keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat tercapai jika tidak disertai usaha yang nyata. Penyelenggaraan pendidikan politik erat kaitannya dengan bentuk pendidikan politik yang diterapkan di masyarakat. Artinya bentuk pendidikan politik menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan politik.

Bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kartaprawira dapat diselenggarakan antara lain melalui:

1. bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal. (Rusadi Kartaprawira, 2004:56)

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita lihat bahwa pendidikan politik dapat diselenggarakan melalui berbagai jalur. Pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya monopoli lembaga seperti persekolahan atau organisasi saja, namun dapat melalui media, seperti media cetak dalam bentuk artikel ataupun media elektronik.

Aspek yang terpenting dalam bentuk pendidikan politik adalah ia harus mampu memobilisasi simbol-simbol nasional, memberikan pemahaman tentang ideologi dan konstitusi negara, serta meningkatkan daya pikir dan daya tanggap rakyat terhadap masalah politik. Selain itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih harus mampu meningkatkan rasa nasionalisme yaitu keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap tanah air, bangsa dan negara.

Berdasarkan pendapat Rusadi media massa merupakan salah satu bentuk pendidikan politik, media massa merupakan kekuatan politik penting yang mempengaruhi proses politik. Media massa memiliki fungsi dominan pada *social*

*control*, mengawal semua proses pemerintahan, termasuk proses pembuatan kebijakan.

Karena itulah keberadaan media massa, terutama pers bebas dianggap sebagai salah satu pilar dari demokrasi. Begitu luar biasanya kekuatan media massa ini digambarkan oleh Malcolm X dengan pernyataan bahwa *“the media’s the most powerfull entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that’s power. Because they control the minds of the masses”*.

Media massa merupakan entitas terkuat di muka bumi karena kemampuannya dalam membentuk dan mengendalikan kesadaran massa. Dengan kekuatan tersebut, media massa bahkan mampu menentukan apa yang baik dan apa yang buruk bagi masyarakat seperti halnya seorang dokter yang mengobati pasiennya.

Namun realitas saat ini media massa maupun media cetak hanya memberitakan yang negatif tentang Politik sehingga membuat rakyat menjadi apatis. Karena media massa belum dapat menangkap semua momen tentang politik dan belum ada figur politisi yang bisa menjadi teladan. Selain itu media massa saat ini menjadi corong salah satu partai politik, sehingga muatan pemberitaan memiliki muatan kepentingan, tidak netral.

Keberadaan media massa dapat membentuk opini publik karena fungsi pendidikan politik pada media massa sangat strategis. Berdasarkan hal itu untuk menjaga kenetralan, media massa perlu menghadirkan berbagai aktor politik yang ada, sehingga publik bisa mendapatkan informasi dari berbagai pihak.

Menurut Udin S. Winataputra, media pendidikan politik yang sudah sangat terstruktur adalah PKN yang kedua adalah program-program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah, program-program pemberdayaan masyarakat pengentasan oleh LSM yang bersumbu pada kehidupan berbangsa dan bernegara, aktivitas-aktivitas perguruan tinggi untuk pengentasan masyarakat, seperti KKN.

Menurut wawancara dengan Winataputra, pengertian media adalah alat

bantu. Saat ini media sosial dijadikan sebagai media pendidikan politik namun pada praktiknya terlalu liberal. Sebagai media komunikasi dalam media sosial sering terjadi caci maki, dengan bahasa yang tidak etis, perlu ada etika bermedia sosial. Sehubungan dengan itu dalam transaksi elektronik ada etikanya, yang diatur dalam UU tentang IT. Demikian juga halnya dengan *mass media* seharusnya mengikuti UU IT, UU tentang kebebasan menyampaikan pendapat dan sebagainya. Permasalahannya masyarakat belum paham batasan tentang kebebasan menyampaikan pendapat. Sehingga kita harus mengekstrak dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, kemudian diambil intisarinya dan diwujudkan dalam bentuk tuntunan perilaku.

### **c. Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik**

Seperti yang diuraikan pada bagian sebelumnya, partai politik seharusnya selain memberikan pendidikan politik kepada para kader-kader partai, partai politik juga harus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Dalam pelatihan pelatihan untuk kadernya, partai politik menggunakan sistem indoktrinasi, dengan penekanan pada internalisasi ideologi partai, AD/ART partai, visi misi partai dan kepentingan partai. Terlihat sekali partai politik berusaha untuk melanggengkan kepentingan-kepentingan politik partai.

Hal ini tidak sesuai dengan UU No 2 2011 tentang Partai Politik

Pasal 34

Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

- 1) pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- 3) pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Selain itu partai politik maupun elite politik belum optimal dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. Partai politik maupun elite politik lebih banyak melakukan propaganda yaitu kampanye partai politik dan penyerapan aspirasi rakyat. Sedikit sekali materi politik yang diberikan oleh Partai politik dan elite politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik.

Menurut UU No 2 tahun 2008 tentang Partai politik pada BAB XIII, pasal 31 PENDIDIKAN POLITIK

- 1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
  - a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Berbicara peran partai politik dalam pendidikan politik, sangat erat kaitannya dengan rekrutmen politik partai yang diatur dalam UU Partai Politik No 2 thn 2008 Pasal 29:

- 1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
  - a) anggota Partai Politik;

- b) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c) bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - d) bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
  - 3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Rekrutmen seharusnya dilaksanakan secara transparan dan terbuka, seperti amanat pasal 11 UU No 2 tahun 2008 tentang partai politik yaitu rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

#### **d. Budaya Politik**

Kondisi masyarakat sekarang mengganggu terhadap sistem politik, dimana ketika kampanye, politisi selalu ditanya “kamu membawa apa untuk masyarakat, bawa jenset traktor atau apa?” Istilahnya *wani piro*. Budaya politik masyarakat Indonesia masih mengarah kepada *money politics*. Biaya politik bagi politisi mahal. Karena kondisi masyarakat lebih cenderung suka *money politics*.

Dalam membahas budaya politik, selalu terkait dengan penilaian individu-individu dalam masyarakat terhadap tempat dan peranannya di dalam sistem politik. Budaya politik dapat dipahami sebagai perpaduan antara dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.

Almond dan Verba mengartikan kebudayaan politik suatu bangsa sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu tidak lain adalah pola tingkah laku individu yang berkaitan dengan kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. (Simamora, 1990: 16)

Dengan memahami kebudayaan politik, kita akan memahami bahwa sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, respon-responnya, dukungannya dan orientasinya terhadap sistem politik itu. Selain itu kita akan paham maksud-maksud individu melakukan kegiatannya dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik.

Budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang di dalam dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh interaksi antar orientasi dan antar nilai yang telah memungkinkan timbulnya kontak-kontak antara budaya suatu kelompok dengan budaya kelompok yang lain. Interaksi antarorientasi dan antarnilai itu pada dasarnya merupakan suatu proses pengembangan budaya politik bangsa. dalam kerangka pengembangan budaya politik suatu bangsa, diperlukan keterjalinan dan keterkaitan antarnilai budaya maupun antarkomponen orientasi dalam masyarakat sehingga dapat terjalin proses integrasi ke arah pengembangan budaya. (Sastroatmodjo, 1995:40)

Menurut Rusadi Kantaprawira budaya politik sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya operasional struktur politik ditentukan oleh konteks kultural tempat struktur itu berada. Menurut Almond, dilihat dari sudut fungsinya bertujuan untuk mencapai atau memelihara stabilitas sistem politik yang demokratis.

Keserasian antara dua variabel yaitu kebudayaan itu dan struktur politik menentukan berfungsinya budaya politik dengan baik. Melihat struktur politik sekarang, elit politik banyak yang melakukan money politics. Mereka melihat bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, mereka memanfaatkan kondisi tersebut untuk melancarkan dukungan dari rakyat. karena dalam sistem pemerintahan demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat yang diwujudkan dalam Pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Karena berlangsung lama pada akhirnya budaya ini mengakar kuat.

Bagi negara-negara berkembang, mereka dihadapkan pada persoalan upaya menyasikan kedua variabel itu secara harmonis. Persoalan pokoknya

bersifat fundamental yaitu dengan budaya mana struktur politik yang mereka dambakan harus diserasikan. Negara berkembang masih banyak diliputi oleh situasi pertarungan untuk merumuskan kebudayaan atau identitas nasional dengan caranya masing-masing.

Secara vertikal terdapat persepsi yang kurang harmonis antara elite politik (pemimpin) dan rakyat (massa), yang secara tegas telah mendudukkan orientasi politiknya dan posisinya di dalam sistem politik. Di antara keduanya telah tercipta konsep bahwa politik adalah orang yang memimpin, merencana, menggerakkan, dan memiliki "kekuasaan" atas massa, serta sebagai orang yang mempengaruhi, sedangkan massa adalah orang yang dikuasai dan dipengaruhi sebagaimana adanya. Refleksi atas persepsi itu selalu mencerminkan perbedaan kepentingan di antara kedua golongan tersebut, apabila jika telah tercipta konsep bagi terbentuknya posisi dan peranan mereka dalam sistem politik. (Sastroatmodjo, 1995: 42)

Almond membuat tentang klasifikasi tipe-tipe budaya politik. Secara garis besar kebudayaan politik dibedakan menjadi politik parokial, subjek dan partisipan.

### **Budaya Politik Parokial**

Menurut pemaparan Sastroatmodjo (1995: 48) budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi yang sangat kecil, belum ada pengkhususan tugas bagi pelaku politik, belum ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri-sendiri. Peranan yang satu dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan perannya baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun keagamaan.

Minat masyarakat secara umum terhadap objek politik tidak begitu besar, mereka tidak mengharapkan apa pun dari sistem politik termasuk bagian-bagian terhadap perubahan sekalipun tetapi hanya dalam batas tertentu, mereka lebih tertarik pada pada obyek yang relatif sempit seperti keterikatan pada profesi. Karena masyarakat sadarkan adanya pusat kewenangan/kekuasaan politik dalam

masyarakat. Sehingga budaya politik parokial lebih bersifat afektif dan orientatif daripada kognitifnya.

### **Budaya Politik Subjek**

Menurut pemaparan Sastroatmodjo (1995:49) Budaya politik subjek memiliki frekuensi yang tinggi terhadap sistem politiknya. tipe ini menyadari akan adanya otoritas pemerintah sehingga orientasi terhadap aspek masukan dan partisipasi terhadap aspek keluaran masih rendah. Sebagai subjek (kaula) mereka pandang sebagai posisi yang pasif. Mereka meyakini posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik. Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subjek 'yang tidak berdaya untuk mempengaruhi ataupun mengubah sistem. Mereka menerima segala keputusan yang dan segala kebijaksanaan pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Mereka menganggap apa pun keputusan pejabat bersifat mutlak, tidak dapat diubah-ubah, dikoreksi, apalagi ditentang. Dalam budaya subjek orientasi dalam sistem politik lebih bersifat normatif dan afektif daripada kognitif. Masyarakat yang memiliki budaya politik seperti itu, bila tidak menyukai terhadap sistem politik yang berlaku hanyalah diam.

### **Budaya Politik Partisipan**

Menurut Sastroatmodjo (1995: 50) Dalam budaya politik partisipan orientasi politik masyarakat secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, terhadap struktur, proses politik dan administratif. Termasuk terhadap input maupun output dari sistem politiknya, individu dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, yang memiliki kesadaran terhadap hak serta tanggungjawabnya. Mereka merealisasikan dan mempergunakan hak-hak politiknya. Dalam budaya politik ini masyarakat tidaklah menerima begitu saja keputusan politik. Mengapa? Masyarakat telah sadar bahwa mereka mempunyai arti penting bagi berlangsungnya sistem politik.

Namun klasifikasi tersebut tidaklah bersifat mutlak, budaya partisipatif tidak hanya diorientasikan terhadap partisipasi aktif dalam politik tetapi juga terhadap partisipasi aktif sebagai subjek di hadapan hukum dan kekuasaan yang sekaligus juga merupakan anggota- anggota kelompok utama yang bervariasi. Dalam masyarakat budaya partisipan, seringkali terdapat warga negara yang tidak tahu fungsinya sebagai warga negara yang harus berpartisipasi, tetapi hanya diam tanpa alasan. Dewasa ini dalam perubahan sistem politik antara kultur dan struktur seringkali tidak selaras, artinya perubahan format politik telah gagal dalam mencapai keselarasan.

Menurut Udin S Winataputra, saya melihat adanya kesenjangan antara cita-cita politik negara, persepsi politik para birokrat negara, persepsi politik para politisi, kemudian persepsi politik warganegara. Pandangan politik negara sudah jelas ada dalam UUD NRI 1945 mulai dari pembukaan hingga aturan peralihan, namun versus birokrasi dari presiden sampai lurah belum mampu menangkap makna semangat konstitusi itu.

Menurut Winataputra, banyak pejabat negara yang salah tafsir tentang UU, contoh dengan UU dikatakan “pendidikan itu satu sistem nasional” pasal 31 ayat 3 “pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan UU”, bahasa hukum diatur dengan UU artinya satu, tetapi sisdiknas sekarang diatur dengan banyak UU yaitu UU sisdiknas, UU guru dan dosen, UU dikti, sehingga makna sebagai satu sistem itu tidak dipahami oleh lembaga negara. Buktinya presiden dan DPR menyetujui adanya UU itu. Menyetujui UU guru dan dosen, UU Dikti, UU pendidikan kedokteran. Hal tersebut menunjukkan ketumpang tindihan. Padahal dalam pasal 31 sudah bahwa “menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan UU”. Kata satu dalam bahasa hukum itu bukan dua, satu adalah satu tunggal, tidak terpecah-pecah. Kalau di atur dalam UU artinya dapat diatur dengan UU berbeda atau UU nya banyak. DPR dan Pemerintah keliru memahami konstitusi pasal 31. Hal ini menunjukkan ada kesenjangan pemahaman antara politisi dengan yang

dikehendaki UUD NRI 1945. Ketika Soekarno-Hatta menyusun pasal 31 di sidang BPUPKI itu berbeda dengan yang ditafsirkan oleh DPR dan pemerintah sekarang. Pemerintah dan DPR terkesan merasa tidak bersalah dan merasa aman-aman saja.

Winataputra berpendapat, banyak orang yang tidak bisa melihat bahwa kekeliruan itu berawal dari pucuk. Pemikiran politisi adalah pemikiran yang partisan, jika dia anggota partai politik A maka apapun yang benar adalah pikiran A. Ketika dia anggota partai politik B apapun yang baik adalah B, ia tidak bisa menerima A karena merasa B yang benar. A tidak bisa menerima B karena yang benar itu adalah A. Artinya Partai politik belum memiliki pandangan ideologis yang sama dengan UUD NRI 1945.

Banyak UU yang diuji materil di Mahkamah konstitusi. Hal itu disebabkan kesenjangan ideologi dengan birokrasi, kemudian kesenjangan ideologi dengan UUD NRI 1945. Kesenjangan terbesar adalah kesenjangan antara apa yang dipersepsikan ideologis masyarakat. Masyarakat hanya mengerti sedikit saja. Contoh ketika waktunya membayar pajak masih harus ditagih.

Kesenjangan ini terjadi karena pemerintah memahami ideologi secara tanggung, ketika pejabat negara berkomunikasi dengan rakyat akan berdasarkan kepada pemahamannya yang tanggung. Ada kesenjangan *multiplex*. Persepsi politik di berbagai lapisan terjadi kesenjangan. Karena semua pihak *missunderstood*, salah mengerti tentang ideologi Pancasila. Menjadi tugas pendidikan politik untuk meluruskan kembali, sehingga masyarakat yang buta huruf sekalipun mengerti bahwa dalam hidup bernegara, satu-satunya obor adalah Pancasila. Implikasi dari kesenjangan persepsi yang *multiplex*, menjadikan perilakumultiplex.

Dari kesenjangan persepsi tersebut ketidak sesuaian antara struktur politik dan budaya politik yang berkembang. Sebagai negara yang menganut Demokrasi Pancasila seharusnya budaya politik yang dibangun adalah budaya demokrasi Pancasila, namun karena kita tergila-gila dengan demokrasi Liberal yang

berkembang di Amerika Serikat, struktur politik yang ada tidak bersesuaian dengan budaya politik yang berkembang. Pembangunan Politik harus lahir dari aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya hanya muncul dari elite politik. Sehingga dipastikan budaya politik akan berfungsi dengan baik.

#### **e. Partisipasi Politik**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para elit politik baik Golkar maupun PDIP, para politisi memandang bahwa partisipasi politik masyarakat ukurannya adalah partisipasi dalam pemilihan umum. Pemikiran mereka menurut peneliti mengarah kepada egosentris. Mereka memandang bahwa masyarakat hanya sebagai objek bagi kekuasaan dan kepentingan mereka.

Walaupun mereka melakukan mekanisme Reses sebagai acara dengar aspirasi rakyat namun mereka tidak menganggap itu sebagai indikator partisipasi politik rakyat. Seharusnya pada acara Reses tersebut mereka memberikan pemahaman tentang berpolitik, tentang bagaimana hidup berbangsa dan bernegara, tidak hanya melakukan kampanye pribadi agar mereka dapat terpilih kembali diperiode berikutnya.

Huntington dan Nelson (1994:6) dalam bukunya yang berjudul Partisipasi Politik di Negara Berkembang mereka mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga-negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah

Kalimat mempengaruhi keputusan pemerintah sebagai bagian dari partisipasi politik bermakna luas. Lebih jelasnya akan peneliti uraikan seperti dibawah ini.

Di pihak lain Budiardjo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (*public policy*) (Budiardjo, 1982: 1)

Bila merujuk kepada pendapat diatas memang pemikiran para politisi ada benarnya. Salah satu indikator partisipasi politik adalah partisipasi dalam pemilihan umum. Namun masih banyak indikator-indikator lain untuk melihat

partisipasi politik, misalkan menyampaikan aspirasi melalui acara Reses, aktif di keorganisasian, adalah suatu bentuk partisipasi politik rakyat terhadap sistem politik.

Huntington dan Nelson (1994) menjelaskan tentang berbagai bentuk wujud partisipasi politik:

- a. Kegiatan pemilihan
- b. Lobbying
- c. Kegiatan organisasi
- d. Mencari koneksi
- e. Tindakan kekerasan

Masih menyimpan PR bagi para anggota dewan dan kader partai bagaimana meningkatkan partisipasi politik masyarakat Jawa Barat. Karena menurut informasi dari Yod Mintaraga tingkat partisipasi politik di Pileg 2014 di Jawa Barat sebesar 68%, sekitar 32 % mereka tidak memilih. Karena di KPU Jabar tidak dijelaskan berapa persen tingkat Partisipasi politik di Jawa Barat.

Apatisme politik warga negara tentu bukan tanpa sebab. Beberapa faktor menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu, di antaranya adalah perilaku elite politik hasil pemilu, baik pemilukada maupun pemilu legislatif yang dirasa mengecewakan publik dengan serentetan kasus korupsi serta kiprahnya yang kurang memuaskan publik. Selain itu, rakyat merasa tidak terkena dampak dari hasil proses politik tersebut.

Dahl, menyebutkan beberapa alasan mengenai orang-orang yang berperilaku tidak mau terlibat dalam politik sebagai berikut:

- a) Orang mungkin kurang tertarik dalam politik, jika mereka memandang rendah terhadap segala manfaat yang diharapkan dari keterlibatan politik, dibanding dengan manfaat yang akan diperoleh dari berbagai aktivitas lainnya.
- b) Orang merasa tidak melihat adanya perbedaan yang tegas antara keadaan sebelumnya, sehingga apa yang dilakukan seseorang tersebut tidaklah menjadi persoalan. Hal itu, misalnya, seseorang yang tidak peduli terhadap Pemilu. Siapa yang menang dalam Pemilu tidaklah menjadi persoalan bagi orang tersebut, sebab

diyakini bahwa hal itu tidak akan mengubah keadaan dan mempengaruhi dirinya.

- c) Seseorang cenderung kurang terlibat dalam politik jika merasa bahwa tidak ada masalah terhadap hal yang dilakukan, karena ia tidak dapat mengubah dengan jelas hasilnya.
- d) Seseorang cenderung kurang terlibat dalam politik jika merasa bahwa hasil-hasilnya relatif akan memuaskan orang tersebut, sekalipun ia tidak berperan di dalamnya.
- e) Jika pengetahuan seseorang tentang politik tersebut terlalu terbatas untuk dapat menjadi efektif.
- f) Semakin besar kendala yang dihadapi dalam perjalanan hidup, semakin kecil kemungkinannya bagi seseorang untuk terlibat dalam politik.

(Dahl, 1985: 157-163)

Dari alasan-alasan di atas, kita dapat mengklasifikasikan tipe-tipe manusia dilihat dari sudut pandang partisipasi politik:

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. *Kategori pertama* adalah apatis, yaitu orang yang menarik diri dari proses politik. *Kedua* adalah spektator adalah orang-orang yang setidaknya-tidak pernah ikut dalam pemilihan umum. *Ketiga* gladiator, yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. *Keempat* pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. (Surbakti, 1992: 43)

Kategori yang pertama adalah kategori yang berbahaya. Karena sikap menarik diri, artinya tidak peduli dengan keadaan negara dan bangsa, tempat dimana ia hidup. Jika sikap ini menular kepada sebagian besar masyarakat akan mempengaruhi legitimasi pemerintahan dan sistem politik yang berlaku.

Rosenberg dalam Sastroatmodjo (1995:75) menyebutkan tiga alasan adanya partisipasi politik.

*Alasan pertama* bahwa individu memandang bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya. Ia beranggapan bahwa mengikuti kegiatan politik dapat merusak hubungan sosial, dengan lawannya dan dengan pekerjaannya karena kedekatannya dengan partai-partai politik tertentu. Atau anggapan bahwa aktivitas politiknya dapat merusak

kehormatan dirinya dengan jalan mengungkapkan kebodohan sendiri, ketidakseimbangan dan ketidakmampuan. Untuk itulah ketidakaktifan dipandang lebih cocok daripada keaktifan.

*Alasan kedua* individu menganggap aktivitas politik merupakan kegiatan yang sia-sia belaka. Individu-individu beranggapan bahwa ia tidak akan mungkin dapat mengubah keadaan dan melakukan kontrol politik. Dalam pandangannya, justru terjadi gap yang dalam antara cita-cita dan realitasnya yang tak ada seorangpun yang dapat menjembatannya.

*Alasan ketiga* berupa ketidakadaan pesaing politik. Hal itu didasarkan atas pemikiran bahwa buah pikiran politik itu tidak menarik baginya dan menganggap bahwa politik hanyalah memberikan kepuasan sedikit dan tak langsung, sedang hasil langsung yang diterimanya sangat sedikit. Dengan kata lain bahwa partisipasi politik baginya bukanlah hal yang layak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya.

Salah satu sikap yang lain adalah sinisme. Agger mengartikan sinisme sebagai "kecurigaan yang busuk dari manusia". Secara politis sinisme memiliki ciri-ciri, seperti perasaan bahwa politik itu adalah urusan yang kotor, politik tidak dapat dipercaya, individu dijadikan bulan-bulanan dari orang yang melakukan manipulasi, kekuasaan "sebenarnya" dilaksanakan oleh orang-orang "tanpa muka". Seorang yang sinis luar biasa mungkin saja merasa bahwa partisipasi politiknya dalam bentuk apa pun juga sia-sia dan tidak ada hasilnya sedikit pun.

Alienasi oleh Lane dinyatakan sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungannya berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain dan mengikuti aturan yang tidak adil. Kelompok orang-orang ini menganggap pemerintahan sebagai keberadaan yang tidak ada artinya serta tidak memberikan konsekuensi terhadap mereka.

Sikap yang terakhir adalah anomie, yang oleh Lane diungkapkan sebagai "suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awal" dengan kondisi seorang

individu mengalami perasaan ketidakefektifan dan bahwa para penguasa bersikap "tidak peduli" yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.

Goel dan Olsen memandang partisipasi sebagai dimensi utama kehidupan stratifikasi sosial. Mereka membagi partisipasi politik menjadi enam lapisan. Adapun bagian-bagian itu adalah pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap, dan informasi politik lainnya pada orang lain), warga negara marginal (orang yang sedikit melakukan kontak dengan sistem politik), dan orang-orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).

Partisipasi politik berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi partisipasi yang bersifat sukarela (otonom) dan atas desakan orang lain (dimobilisasi). Nelson membedakannya dengan dua sifat, yaitu "*autonomous participation*" (partisipasi otonom) dan "*mobilized participation*" (partisipasi yang dimobilisasikan).

Terkait *mobilized participation* Udin S. Winataputra berpendapat, Karena Partisan, memang terlihat dilakukan oleh partai politik, karena partai politik memandang tugasnya adalah untuk memobilisasi massa agar mendapatkan kekuasaan. Hal itu tidak dilarang. Namun birokrasi jangan kalah dengan mobilisasi partai politik. Bupati harus berdiri tegak, dia tidak boleh berpihak pada salah satu partai politik. Presiden walaupun dicalonkan oleh PDIP, Gubernur walaupun oleh PKS ketika ia menjadi walikota, gubernur, presiden, ia harus melepaskan kepentingan partai, *The loyalty to the Party end, when loyalty to the nation begin*. Loyalitas ke partai selesai ketika kita dilantik menjadi pejabat negara. Jangan sampai birokrasi amblas didalam kepentingan partai.

Menurut Udin S. Winataputra, Pertama tujuan mobilisasi harus untuk kepentingan bangsa dan negara. Berbicara mobilisasi terdiri dari mobilisasi orang, mobilisasi dan mobilisasi pengaruh. Istilah mobilisasi terlalu kasar. Dalam konteks berbudaya pancasila, semestinya kita tidak menggunakan konsep

mobilisasi, karena mobilisasi itu adalah upaya mendapatkan pengaruh yang sebesar-besarnya untuk mengalahkan orang lain.

Seharusnya berusaha membangun keyakinan publik tentang *goodness*, mobilisasi itu bukan mendorong orang jika perlu dibayar, tetapi membangun kepercayaan orang. Karena pengakuan tidak bisa dipaksakan. Hormat kita kepada orang lain tidak dapat dipaksakan. Maka menurut Likona dalam membangun politik itu ada 2. 1) bagaimana membangun nilai *respect* 2) *responsibility*. *To built respect and responsibility at the same time in any heart of the people*.

Secara kontekstual perilaku politik warga negara ataupun peran sektor politik (elite politik) didasarkan pada persepsi budaya politik. Persepsi terhadap budaya politik tersebut kemudian akan mempengaruhi keikhlasan dan penerimaan warga negara terhadap keputusan-keputusan politik, dan dalam menciptakan sikap-sikap mendukung atau penolakan warga negara terhadap sistem politik tersebut. (Sastroatmodjo, 1995: 61)

Untuk itulah Lane dalam Rush (1989:181-182) dalam studinya mengenai keterlibatan politik menyebutkan bahwa partisipasi politik paling tidak memiliki empat fungsi.

*Fungsi pertama* sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi. Partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya, ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material,

*Kedua* sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik,

*Ketiga* sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek, tender-tender, dan

melicinkan karier bagi jabatannya seringkali politik dijadikan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya dan

*Keempat* sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu. seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

Sanit (1985:94) membagi partisipasi politik di Indonesia dapat menjadi tiga tujuan *Pertama* memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya. Partisipasi politik ini sering terwujud dalam bentuk pengiriman wakil-wakil utusan pendukung ke pusat pemerintahan, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik yang telah dibina dan dilembagakan oleh penguasa tersebut.

*Kedua* partisipasi yang dimaksudkan sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah. Langkah itu dilakukan dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali memperbaiki atau mengubah kelemahan tersebut. Partisipasi ini dapat terlihat dalam bentuk membuat petisi, resolusi, aksi pemogokan, demonstrasi, dan aksi protes.

*Ketiga* partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik. Untuk mencapai tujuan seperti itu seringkali dilakukan pemogokan, pembangkangan huru-hara dan kudeta bersenjata

### **3. Pengalaman Elite Politik terkait Pendidikan Politik**

#### **a. Kompetensi dan Pengalaman Elite Politik**

Seperti dalam ketentuan umum UU No 2 thn 2008 tentang Partai Politik Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompokwarga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-citauntuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik

anggota, masyarakat, bangsadan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

- 1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
  - a) Mewujudkan cita-cita nasional bartgsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
  - a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
  - b) memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

#### Fungsi Partai Politik

- 1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
  - a) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- b) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
  - d) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
  - e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

#### Fungsi DPRD Provinsi

##### Pasal 316

- 1) DPRD provinsi mempunyai fungsi:
- a) legislasi;
  - b) anggaran; dan
  - c) pengawasan.

Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas:

- a) membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- b) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

- e) memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k) melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap elite politik, yang akan duduk di kursi DPRD Provinsi harus memiliki semua kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi anggota DPRD Provinsi yang diatur dalam UU MD3. Setiap kader partai yang duduk di DPRD adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam legislasi, anggaran dan pengawasan.

Partai politik harus mengirimkan caleg-calegnya yang berkualitas, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam UU No 2 tentang Partai Politik, karena jabatan politik ini jabatan yang strategis yang menentukan masa depan masyarakat provinsi Jawa Barat.

#### b. Sikap dan Orientasi Elite Politik

Sejauh ini hanya ada dua macam orientasi politik yang ada dalam politik di Indonesia, yaitu yang pro-kerakyatan dan pro-kepentingan masing-masing. Sikap politik elit mengikuti orientasinya. Kebanyakan pola pikir politikus Indonesia hanya berpikir bagaimana membuat dirinya baik dimata konstituen dan elite partai sehingga bisa terpilih lagi pada periode berikutnya.

Sikap mereka sangat jauh dari ideal. Mayoritas hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongannya saja. Sangat jarang menemukan perdebatan atau diskusi tentang kepentingan rakyat banyak.

Ada yang menarik dari deskripsi penelitian pada bab sebelumnya. Elite politik banyak yang belum memahami bagaimana membumikan Pancasila menjadi sebuah kebijakan, karena mereka belum paham sepenuhnya tentang Pancasila. Sehingga mereka membuat lebih sederhana dengan mengembalikan ukurannya terhadap visi mensejahterakan rakyat.

Artinya pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik belum berhasil memberikan pemahaman tentang bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam proses legislasi. Menurut Udin S. Winataputra mengapa ini bisa terjadi, pendidikan politik di Indonesia berjalan sendiri-sendiri. Setiap partai politik, organisasi massa, organisasi profesi juga melakukan pendidikan politiknya sendiri-sendiri. Muhammadiyah sendiri, NU sendiri, mereka mempersepsikan pendidikan politik sendiri-sendiri. Produk keberagaman yang tak teratur itu menjadikan kesenjangan persepsi ideologis.

Solusinya 1) Re-Ideologisasi mendorong menggiring mengajak menuntun seluruh komponen bangsa Indonesia, mulai dari individu, organisasi partai politik, ormas, kemudian lembaga swadaya masyarakat kembali ke patokan dasar yaitu ideologi Pancasila, memahami Pancasila seutuhnya. Jangan memahami Pancasila hanya daripengertian struktural kata-kata yang ada pada setiap sila, atau hanya memahami Pancasila terdiri dari lima sila, tetapi kita harus memaknai bahwa jika kita berbicara kemanusiaan maka kemanusiaan yang harus berkeTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang berkesatuan indonesia, kemanusiaan yang mampu hidup berdemokrasi, kemanusiaan yang berkeadilan sosial, jadi sila sila itu harus ditempatkan didalam sentrumnya. Elite politik harus berdemokrasi yang berkeTuhanan. Ketika ia menjalankan *money politics* dengan membayar orang untuk memilih, menurutnya tidak ada orang yang tahu, dia lupa bahwa bagi orang yang berkeTuhanan, mereka percaya ada malaikat yang mencatat perilaku baik

dan buruk. Politisi yang berkeTuhanan tidak akan membayar orang untuk memilihnya. Dia tidak akan berbohong dan mengobral janji yang belum tentu ia capai, ketika ia ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara keadilan sosial tidak akan ada beras yang diselewengkan, minyak yang diselewengkan.

2) Re-Konseptualisasi tugas lembaga negara dan pendidikan tinggi untuk merekonsep, mengkonsep ulang apa yang dimaksud pendidikan politik. Sehingga tidak terjadi *miss perception* pendidikan politik.

3) Re-Instrumenisasi, alat-alat dan prasarana ditata ulang. Apakah ceramah-ceramah, pidato, pembelajaran di kelas, tayangan televisi dan sebagainya harus ditata ulang kembali.

4) Re-Praksisasi, membenahi kehidupan nyata. Contoh sederhana, dahulu kota Bandung kacau dan kumuh. Pada masa kekepmimpinan walikota Bandung Ridwan Kamil, walikota Bandung mentata kembali kota Bandung dari kondisi kumuh menjadi indah, Alun-Alun kota Bandung yang semula banyak transaksi seksual dirubah fungsi menjadi tempat silaturahmi. Tindakan yang dilakukan Ridwan Kamil adalah Re-Ideologisasi, bagaimana hidup sebagai orang Bandung. Re-Instrumenisasi membenahi taman-taman kota menjadi indah, setiap orang yang duduk ditaman tidak dicurigai dan tidak malu.

5) Re-Edukasi pendidikan politik, warga didik untuk melek politik (*political literacy*), tidak harus melalui pendidikan formal di sekolah, tetapi dapat melalui program-program yang inklusif melibatkan seluruh komponen. Contoh mudah dalam kehidupan sehari-hari, buang sampah pada tempatnya, jangan mengandalkan petugas kebersihan pemerintah, jika seluruh warga kota bandung membuang sampah pada tempatnya, *The clean city* akan tercapai. Masing-masing individu mendidik diri sendiri. Dalam bahasa agama adalah *Ibdabinafsih*, dan *fastabiqulkhoirot*, mulai dari diri sendiri dan berlomba-lombalah dalam kebaikan.

Berbicara tentang sikap dan orientasi elite politik, terlebih dahulu perlu kita pahami apa yang dimaksud elite politik. Menurut Sastroatmodjo:

Dalam sebuah masyarakat hanya terdapat dua kelas yang menonjol, yaitu kelas yang memerintah dan yang diperintah. Terdapat tiga asumsi yang mendasari pandangan itu. *Asumsi pertama* bahwa dalam masyarakat tidak pernah terdapat distribusi sumber-sumber kekuasaan secara merata. Orang-orang yang memiliki sumber-sumber kekuasaan itulah yang akan memiliki kekuasaan politik. Jumlah orang-orang yang memiliki sumber-sumber itu hanya sedikit. Kelompok yang memiliki sumber-sumber kekuasaan politik itulah yang kemudian mempunyai peluang kekuasaan politik atas masyarakat. *Asumsi kedua* ialah bahwa jumlah orang yang memerintah suatu masyarakat negara selalu sedikit, yaitu hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan saja. *Asumsi ketiga* ialah bahwa di antara elite politik selalu terdapat kesamaan nilai dan berusaha mempertahankan nilai-nilai itu, yang berarti mempertahankan status sebagai elite. (Sastroatmodjo, 1995: 153)

Elite politik adalah kelompok individu yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan proses pengambilan keputusan politik. Faktor keturunan, kebangsawanan, status sosial telah menjadikan segolongan orang dalam masyarakat memiliki peran sebagai elit. Dalam model elit yang memerintah, distribusi kekuasaan politik ditentukan hanya oleh sebagian masyarakat itu. Dalam model pluralis terjadi interaksi antara elit dengan warganegaranya atas dasar transaksi kekuasaan. Artinya elit kekuasaan muncul atas dasar pertimbangan kualitas yang dipilih oleh masyarakatnya. Dan dalam model kerakyatan yang muncul sebagai elit adalah manifestasi rakyat itu sendiri dalam bentuk perwakilan-perwakilan.

Elite politik tersebut berhubungan erat sekali dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki beberapa ciri yang oleh Andrain dikemukakan sebagai berikut:

1. Kekuasaan terutama merupakan hubungan antarmanusia;
2. Pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak lain;
3. Pemegang kekuasaan itu bisa seorang individu, sekelompok orang, kelompok sosial, kelompok budaya, atau bisa juga pemerintah;
4. Sasaran kekuasaan (yang dipengaruhi) bisa berupa individu, kelompok, atau pemerintah;

5. Seorang yang mempunyai sumber-sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan (Hal itu tergantung pada penggunaan sumber-sumber itu);
6. Penggunaan sumber-sumber mungkin secara paksaan, konsensus, atau kombinasi. (Hal itu bergantung kepada suatu perspektif moral, apakah tujuan yang hendak dicapai itu baik atau buruk);
7. Hasil penggunaan sumber-sumber itu bisa menguntungkan seluruh masyarakat atau bisa juga hanya menguntungkan sekelompok kecil masyarakat bergantung kepada ada tidaknya distribusi kekuasaan yang relatif merata dalam masyarakat;
8. Umumnya kekuasaan politik mempunyai makna bahwa sumber-sumber itu digunakan dan dilaksanakan untuk masyarakat umum; sedangkan kekuasaan yang bersifat pribadi cenderung digunakan untuk kepentingan sebagian kecil masyarakat; dan
9. Kekuasaan yang beraspek politik adalah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Dahl, Laswell dan Kaplan dalam Sastroatmodjo (1995: 152) menekankan "pengaruh" sebagai konsep sentral dalam kekuasaan. Pengaruh itu dilihat dari sejauh mana seseorang mau melakukan suatu tindakan yang dikehendaki oleh orang lain untuk tujuan tertentu. Menurut Dahl, kekuasaan tidak terlepas dari kekuasaan sanksi. Dengan kekuasaan sanksi menyebabkan pihak lain menurut kemauan pihak penguasa dengan dibayang-bayangi oleh sanksi yang berat jika tidak patuh.

Dalam kajian tentang elit dalam sistem politik akan sulit dipahami apabila tidak dipahami mengenai distribusi kekuasaan. Dengan memahami distribusi kekuasaan dalam sebuah sistem politik itu, dapatlah diperoleh gambaran sejauh mana elit memiliki peran dalam sistem politik itu. Dengan memahami distribusi kekuasaan itu akan dipahami bagaimana perilaku politik elit politik. Tiga model yang dapat dipakai sebagai dasar untuk mempelajari posisi elit dalam sistem politik. Menurut Andrain

terdapat tiga model distribusi kekuasaan yang dapat dijadikan dasar untuk mempelajari elite politik, yaitu *model elite yang memerintah, model pluralis, dan model populis*. (Sastroatmodjo, 1995:152)

Menurut Sastroatmodjo, Model pertama lebih menekankan kekuasaan dipegang oleh sebagian kecil kelompok yang disebut sebagai elite. Model kedua memiliki argumen bahwa kekuasaan didistribusi secara relatif merata kepada berbagai kelompok sosial, sedangkan yang terakhir berpendapat bahwa kekuasaan dipegang oleh individu atau rakyat seluruhnya. Untuk memahami perilaku politik para elite politik itu perlu dipahami ketiga model distribusi kekuasaan politik tersebut dalam sistem politik.

### **Elite yang Memerintah**

Pandangan Mosca, Pareto dan Michel menekankan bahwa dalam sebuah masyarakat hanya terdapat dua kelas yang menonjol, yaitu kelas yang memerintah dan yang diperintah. Terdapat tiga asumsi yang mendasari pandangan itu. *Asumsi pertama* bahwa dalam masyarakat tidak pernah terdapat distribusi sumber-sumber kekuasaan secara merata. Orang-orang yang memiliki sumber-sumber kekuasaan itulah yang akan memiliki kekuasaan politik. Jumlah orang-orang yang memiliki sumber-sumber itu hanya sedikit. Kelompok yang memiliki sumber-sumber kekuasaan politik itulah yang kemudian mempunyai peluang kekuasaan politik atas masyarakat. *Asumsi kedua* ialah bahwa jumlah orang yang memerintah suatu masyarakat negara selalu sedikit, yaitu hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan saja. *Asumsi ketiga* ialah bahwa di antara elite politik selalu terdapat kesamaan nilai dan berusaha mempertahankan nilai-nilai itu, yang berarti mempertahankan status sebagai elit.

Jadi elite yang memerintah berjumlah sedikit, kebijakan-kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan oleh elite bukanlah cerminan dari tuntutan dan aspirasi masyarakat, tetapi lebih kepada penghayatan elite terhadap nilai-nilai yang menguntungkan posisinya. Dalam model ini, elite berupaya untuk menduduki kekuasaan itu secara lambat. Stabilitas politik dan stabilitas ekonomi

akan sangat membantu elite dalam menjalankan kekuasaan serta mempertahankannya secara terus-menerus.

Dye dan Zeigler (1970) mengemukakan tiga perbedaan karakter dasar dalam model elite ini.

*Karakter pertama* adalah apa-apa yang dilakukan oleh elite politik itu senantiasa diorientasikan dan ditujukan untuk pemenuhan kepentingan dirinya sendiri atau demi kepentingan golongannya. Elite politik yang seperti ini umumnya selalu menjaga jarak dan jika perlu membatasi jarak antara kelompoknya yang elite dengan kelompok yang dikuasainya. Dengan sifatnya yang demikian itu, maka lapisan ini cenderung bersifat piramid, hierarkis, dan kaku. elite jenis ini seringkali disebut sebagai elite konservatif.

*Karakter kedua* elite politik yang segala perilaku politiknya berorientasi pada masyarakat umum. Dengan demikian, umumnya model ini memiliki sifat yang terbuka kepada golongan masyarakat yang bukan elite. Mereka memiliki kecenderungan untuk membiarkan kondisi yang kompetitif dalam masyarakat untuk menduduki elite politik sehingga lapisan politik ini cenderung bersifat pluralistik. Dengan orientasi kepada kepentingan masyarakat umum dan keterbukaan itu, elite politik ini akan bersifat tanggap terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat umum. sangat mungkin terjadi munculnya elite itu merupakan wakil dari berbagai golongan dalam masyarakat yang majemuk. Elite dengan sifat ini sering disebut sebagai elite liberal.

*Karakter ketiga* mereka yang termasuk dalam golongan "*counter elit*" yakni pemimpin-pemimpin yang berorientasi kepada masyarakat banyak dengan cara menentang segala bentuk kemapanan dan segala bentuk perubahan. Kelompok ini memiliki ciri-ciri yaitu ekstrem, tidak toleran, anti intelektualisme, mempunyai identitas rasial, menuntut persamaan, dan menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan aspirasinya. Kelompok ini terbagi menjadi dua yakni kelompok sayap kiri dan sayap kanan. Kelompok sayap kiri ialah kelompok yang senantiasa menginginkan perubahan-perubahan secara radikal dan revolusioner,

sedangkan kelompok sayap kanan adalah sebaliknya, yaitu kelompok yang menentang segala macam perubahan baik sosial budaya, ekonomi maupun politik.

Dan satu hal yang penting ialah keduanya dalam melakukan aktivitasnya senantiasa mengatasnamakan aspirasi rakyat. Mereka masing-masing merasa dirinya sebagai pengembang suara rakyat dan terus-menerus menuntut agar rakyat dapat menguasai hukum, lembaga-lembaga, dan prosedur, serta hak-hak individual.

Menurut Sastroatmodjo, dalam model elite yang memerintah ini terdapat sifat yang sama antara golongan konservatif dan golongan liberal. Kesamaan itu berupa kesempatan memiliki kewenangan memerintah, membagi kekuasaan, membuat keputusan dan kebijakan politik. Di samping itu golongan-golongan tersebut selalu berusaha mempertahankan kedudukannya yang istimewa dalam masyarakat, bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sistem politik mana pun masyarakat yang menganut model ini akan diperintah oleh elite.

### **Elite Model Pluralis**

Model distribusi kekuasaan ini didasarkan pada asumsi:

Bahwa setiap masyarakat tergabung dalam kelompok sosial atau organisasi masyarakat tertentu sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya baik kepentingan ideologis, ekonomis, maupun kepentingan yang bersifat kultural. Kelompok sosial dan organisasi masyarakat itu berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan para anggotanya dan menjadi perantara antara anggotanya dengan pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Bahwa kelompok dan organisasi masyarakat tersebut berusaha mempertahankan otonomi dan karakteristiknya baik dari pengaruh organisasi lain maupun dari campur tangan pemerintah (Sastroatmodjo, 1995: 157).

Dalam model pluralis, pemerintah berperan untuk memelihara berbagai kepentingan baik antar kelompok dan golongan maupun organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi sosial politik. Kebijakan-kebijakan umum yang diambil pemerintah sebenarnya adalah hasil kesepakatan-kesepakatan dari berbagai kelompok sosial dan organisasi-organisasi masyarakat. Artinya keseimbangan kekuasaan berusaha untuk dicapai bukan saja keseimbangan di

antara kelompok-kelompok sosial di tingkat bawah, melainkan juga terjadi pada lembaga-lembaga tinggi negara. Dengan model ini diharapkan kepentingan dan tujuan masyarakat akan lebih dapat tercapai.

### **Elite Model Kerakyatan**

Menurut Sastroatmodjo, terdapat empat asumsi dari model kerakyatan ini berdasarkan pemahaman demokrasi. *Pertama* setiap warga negara yang telah dewasa secara potensial mempunyai kekuasaan politik seperti hak memilih dalam pemilihan umum. *Kedua* setiap warga negara mempunyai perhatian dan minat yang besar pada proses politik, karena itu setiap warga negara mempunyai motivasi untuk aktif dalam politik. *Ketiga* setiap warga negara mempunyai kemampuan untuk mengadakan penilaian terhadap politik, karena mereka mempunyai informasi politik yang memadai. *Keempat* warga negara memiliki peranan yang besar dalam pembuatan keputusan politik. Model elite yang memerintah, baik model pluralis maupun model kerakyatan ini jika dikaji secara mendalam akan menuju ke satu muara bahwa bagaimanapun dalam suatu pemerintahan akan tetap dipegang dan dikendalikan oleh sekelompok orang yang memegang pengambilan keputusan.

Model distribusi kekuasaan yang ketiga ialah model kerakyatan. Dalam model ini yang menjadi perhatian utama dari kekuasaan adalah rakyat. Kekuasaan pada rakyat merupakan hak rakyat sepenuhnya. Model ini seringkali disebut sebagai model demokrasi.

Dalam model kerakyatan terdapat anggapan bahwa semua warga negara memiliki kemampuan yang sama, namun kenyataannya tidak demikian. Terdapat beberapa keadaan individu, seperti sakit jiwa, dalam status masa tahanan, dan keadaan tertentu yang memaksa tidak memiliki hak pilih karena putusan pengadilan. Sedangkan tidak semua rakyat memiliki minat dan perhatian yang sama terhadap politik, tidak semua masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Tidak semua masyarakat memiliki tingkat penilaian dan evaluasi yang sama terhadap politik. Kesimpulannya tidak semua masyarakat berperan besar

dalam pembuatan keputusan karena tidak semua masyarakat memiliki kekuasaan. Dari uraian diatas kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa dalam kehidupan politik, wewenang memerintah dan menentukan kebijaksanaan politik adalah konsekuensinya sebagai elite.

### **c. Interaksi Elite Politik dan Massa**

Berkaitan dengan pembahasan hubungan elite dan kekuasaan itu, terdapat interaksi antara elite yang memerintah dengan rakyat yang diperintah. Kaum elite bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan, sekaligus mengarahkan perilaku masyarakat sebagai kekuatan politik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut UU No 17 thn 2014 tentang MD3 Pasal 324 tentang kewajiban anggota DPRD. Kewajiban Anggota DPRD adalah:

- 1) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- 2) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- 3) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- 4) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Menurut Sastroatmodjo, interaksi antara elite dengan massa sebagai proses yang alami dalam suatu kekuasaan atau pemerintahan yang harus ada dan diadakan. Persoalan itu menjadi menarik karena tingkat dan intensitas interaksi politik itu. Dalam negara-negara yang cenderung demokratis, interaksi elite dengan penguasa memiliki saluran-saluran hukum dan konstitusi yang lebih menitikberatkan pada kekuasaan rakyat. Hal itu dapat terlihat dari adanya institusi-institusi yang mendukung proses politik seperti:

- 1) Adanya kebebasan individu dalam mengemukakan pendapat, menyampaikan kritik, saran dan kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan;

- 2) Adanya partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang senantiasa mengartikulasi kepentingan masyarakat untuk dijadikan pertimbangan dalam penentuan keputusan politik;
- 3) Adanya kebebasan pers yang mampu dijadikan sarana untuk berkomunikasi dan menyampaikan kontrol terhadap pemerintah;
- 4) Adanya mekanisme pemilihan umum yang dilembagakan yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat; dan
- 5) Adanya lembaga peradilan yang tidak memihak yang dapat memberikan jaminan keadilan bagi penguasa dan rakyat di depan hukum.

Interaksi antara elite dan massa sesuatu yang alami dan harus ada.

Kekuatan massa sangat penting jika dihubungkan dengan konteks proses politik yang dilembagakan seperti dalam pemilihan umum ikut menentukan munculnya elit politik. Elite politik yang muncul adalah elite politik yang didukung oleh massa dengan jumlah yang besar. Partai-partai politik menjadi sarana yang penting dalam mengelola kekuatan massa. Meskipun massa tersebut tidak akan mengolah sendiri aspirasi dan segala macam kepentingannya, aspirasi politik itu dikelola oleh pihak-pihak yang mewakili mereka dalam partai politik.

Sebagai negara yang sedang membangun, Indonesia perlu mengembangkan kultur baru, dengan meninggalkan kultur feodal yang membayangi sejarah masa lalu Indonesia yang berasal dari kerajaan-kerajaan, dimana rakyat selalu mendukung serta taat pada pemimpin atau raja mereka tanpa daya kritis.

Realitas saat ini tentang interaksi elite politik dan massa antara lain, berdasarkan data dari pikiran rakyat 6 april 2014, Politik uang di Jawa Barat tergolong tinggi. Menurut laporan temuan awal pemantauan politik uang yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW), Jawa Barat menempati urutan kelima dalam hal politik uang serta penyalahgunaan fasilitas dan jabatan negara dalam Pemilu 2014.

ICW melakukan pemantauan di 15 provinsi di Indonesia. Hasilnya, terdapat 135 pelanggaran politik uang dan penyalahgunaan jabatan serta fasilitas negara. Pembelian barang merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi, yaitu sebesar 59%, disusul dengan pemberian uang sebanyak 12%, dan pemberian jasa 12%.

Berdasarkan wilayahnya, pelanggaran paling banyak terjadi di Provinsi Riau, yaitu sebanyak 32 kasus. Disusul oleh Sumatera Utara dengan 18 kasus, Banten 16 kasus, Sulawesi Selatan 14 kasus, dan Jawa Barat 12 kasus.

Menurut hasil pemantauan awal ICW, 12 kasus yang terjadi di Jabar itu antara lain pemberian bahan bakar, pemberian alat rumah tangga dan motor, pemberian hiburan dan layanan kesehatan, pemberian uang dengan nominal mulai Rp 25.000 sampai di atas Rp 200 ribu, serta penggunaan fasilitas negara untuk peraga kampanye.

Pelanggaran itu dilakukan oleh kandidat sendiri juga tim sukses dan tim kampanyenya. Partai yang tercatat melakukan pelanggaran itu antara lain Partai Demokrat (2 kasus), Partai Persatuan Pembangunan (4 kasus), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (1 kasus), Partai Amanat Nasional (1 kasus), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (2 kasus), Partai Golkar (1 kasus). Satu kasus dilakukan oleh calon anggota DPD.

Peneliti ICW Donal Fariz mengatakan, pola pemberian uang dan barang menjadi modus politik uang yang paling banyak digunakan untuk membangun keterpilihan.

Politik uang dan penyalahgunaan fasilitas negara banyak dilakukan oleh kandidat dan timnya. Praktik politik uang inibanyak dilakukan oleh kandidat pencalonan DPRD kabupaten/kota. Sebab di tingkat itu persaingan antar kandidat berlangsung sengit.

Dari hasil pemantauan di 15 provinsi itu menunjukkan, pelanggaran paling banyak dilakukan oleh Partai Golkar (23 kasus), PAN (19), Partai Demokrat (17),

PDIP (13), PPP (12), PKS (10), Hanura (9), Gerindra (8), PBB (7), Nasdem (6), PKB (2), dan PKPI (1).

Temuan menarik di pemantauan ini, banyaknya ditemukan janji pemberian uang atau pascabayar. Donal menjelaskan, modusnya bermacam-macam.

Misalnya membagi kupon dan baru bisa ditukar uang setelah pemilihan. Cara lainnya, dengan menggunakan metode seperti MLM, seseorang akan diberi sejumlah uang asal bisa mendapatkan 10 pemilih.

“Model pascabayar ini karena pada Pemilu sebelumnya banyak caleg yang rugi karena sudah menghabiskan banyak uang tetapi kalah. Maka itu sekarang mereka hanya mau memberi uang pada mereka yang benar-benar memilih,” katanya di kantornya, Minggu (6/4/2014).

Menurut pemantauan, barang yang paling sering dibagi ialah pakaian, sembako, dan alat rumah tangga. Sedangkan nominal uang yang dibagikan paling kecil Rp 5 ribu sampai di atas Rp 200 ribu. Paling banyak yang dibagikan kisaran Rp 26 ribu-50 ribu.

Peneliti ICW lainnya, Abdullah Dahlan menjelaskan, selain uang dan barang ICW juga menghitung pemberian berupa jasa, termasuk pengobatan kesehatan gratis yang sering dilakukan oleh kandidat.

“Pengobatan gratis itu masuk sebagai politik uang karena pelayanan kesehatan gratis ini bukan hal yang sering dilakukan mereka. Dan di kegiatan itu selalu ada ajakan untuk memilih calon tertentu. Kalau ada pembagian obat biasanya ada sticker kandidat. Di situ ada aying-iming untuk memilih calon tertentu,” katanya.

Selain pelayanan kesehatan, jasa lain yang diberikan misalnya layanan pendidikan dan hiburan atau pertunjukan.

Sementara itu, pelanggaran berupa penyalahgunaan fasilitas dan jabatan dalam kampanye Pemilu paling banyak terjadi ialah penggunaan alat peraga, keterlibatan aparat pemerintah, penggunaan mobil dinas, penggunaan program pemerintah, penggunaan rumah ibadah, dan rumah ibadah.

Mayoritas elite politik melakukan obral janji namun banyak tidak direalisasikan. Pada umumnya janji yang diumbar adalah akan memperjuangkan kesejahteraan daerah tersebut serta mengembangkan potensi daerah bila ia terpilih dan duduk di legislatif ataupun eksekutif.

Ketika janji-janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh elite politik, akhirnya masyarakat kecewa, dan memiliki persepsi negatif tentang elite politik sehingga lahirlah apatisme dan pragmatisme masyarakat.

Menurut Sanit, selain pembangunan ekonomi, Sanit berpendapat:

Perbaikan sosial ekonomi, perlu diimbangi oleh perkembangan kultur politik baru sehingga massa terluput dari kecenderungan untuk menerima dan mendukung suatu elite kekuasaan tanpa daya kritis, suatu sikap massa yang berkembang dalam tradisi kebanyakan kelompok masyarakat Indonesia. (Sanit,1985:18).

Menurut Kokotiasa (2012) mayoritas masyarakat yang awam pada umumnya dengan sengaja lebih banyak difungsikan sebagai obyek politik, konsumen politik dan pengikut politik total patuh tunduk, tanpa mampu memahami kedudukan pribadinya, peranan politik, hak dan kewajibannya selaku warga negara. Mereka merupakan arus bawah yang pada umumnya tidak menyadari kalau dalam kondisi terhegemoni dan terkooptasi oleh jejaring kekuasaan yang menggurita. Masyarakat yang memiliki kesadaran dan daya kritis akan menyelamatkan masa depan negara dan bangsa ini dari elite-elite politik yang serakah, egoistis dan pragmatis.

#### **4. Konstruksi Pendidikan Politik Ideal**

##### **a. Konstruksi Pendidikan Politik bagi Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Udin S. Winataputra, sesuatu yang ideal adalah 1) berbasis nilai dan moral Pancasila. 2) kulturalnya bernilai dan bernuansa Pancasila. Seperti dalam presentasinya Kokom Komalasari *Living values education* bisa terserap kalau kita terlibat di dalamnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sholat, kita berjamaah, ketika kita berbuka puasa kita berdoa terlebih dahulu bersama keluarga. Instrumennya diperkaya dengan

sosial kultural. Mengapa dulu orang berkata “perilaku orang akan berubah jika didalam dirinya mau berubah”, pendekatan psikologis karena adanya motivasi dalam diri individu tersebut. Persepsi lainnya adalah “perilaku orang akan berubah jika mendapat penguatan dari lingkungan”, karena itu ada orang yang mengatakan” jika kita bergaul dengan kiyai maka kita menjadi santri, kalau kita bergaul dengan penjahat kita menjadi pencoleng”. Hal itu mengajarkan kita tidak boleh salah dalam memilih pergaulan di masyarakat.

Kecerdasan itu ada didalam masyarakat.Orang yang hidup sendirian di hutan mustahil menjadi orang baik. Bagaimana ia dapat belajar hidup baik dengan orang lain? Oleh karena itu kita harus hidup dengan masyarakat, membantu masyarakat, menyerap memperbaiki masyarakat. pada lembaga pendidikan formal Pancasila diajarkan di kelas, dipidatokan oleh pejabat, dibuat papan nama, dibuat slogan, tetapi ketika kita pergi kejalan raya Pancasila tidak muncul. Pengamalan Pancasila di tingkat horisontal angat kurang, sering kita lihat pengendara motor ngebut di jalan pemukiman, lampu merah yang diterobos. Hal ini menunjukkan pendidikan kultur kemasyarakatan masih kurang.

Terkait kompetensi politik yang harus dimiliki dan dipahami oleh masyarakat adalah 1)Politik sebagai seni. Masyarakat tidak perlu paham tentang politik sebagai ilmu. 2)Politik itu sebagai teknik sebagai cara kerja. 3)Politik sebagai etik.

Pendidikan politik bagi masyarakat pertama-tama yang harus diajarkan adalah 1)politik sebagai etik, 2)politik sebagai budaya kehidupan, dan terakhir 3) baru politik sebagai teknik. Selama ini mayoritas elite politik mengajarkan “marilah kita memilih satu”.Seharusnya elite politik mengajarkan tentang hidup bermasyarakat, mengapa kita hidup bersama? Mengapa perlu ada pemimpin?

Menurut Winataputra Prof Baren pernah menulis buku dalam bahasa belanda didalam bukunya didalam berpolitik, harus dimaknai sebagai politik adalah etik dan politik sebagai teknik. Kondisi perpolitikan gaduh karena para politisi menggunakan politik sebagai teknik. *How to get power, how to use power,*

*how to defeat other friends*, bagaimana mengalahkan, bagaimana mendapatkan kekuasaan, menurut prof Baren bangun politik sebagai etik dahulu. Mengapa kehidupan politik kita kacau balau karena yang elite politik mendahulukan teknik, bagaimana supaya saya terpilih. Saat ini sistem pemilu kita adalah proporsional terbuka, antar elite politik atau caleg dalam partai politikpun saling berebut, berkompetisi, sehingga terjebak didalam pertikaian, begitu temannya terpilih, silaturahmiya putus.

Politik etik adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dilupakan karena kita tergila-gila dengan demokrasi liberal “*one man one vote*”. Sila keempat Pancasila tidak mendorong kepada *one man one vote*. Orde reformasi, yang seharusnya melahirkan format sistem politik yang ideal berdasarkan Pancasila tetapi lebih mengarah kepada konsep-konsep demokrasi liberal. Kita mencaci Amerika tetapi jiwanya diambil utuh. Kesimpulannya kita jangan terfokus pada pendidikan politik yang struktural tetapi kepada pendidikan politik yang fungsional, yang pendekatannya horizontal, bukan vertikal.

#### **b. Konstruksi Pendidikan Politik bagi Elite**

Elite politik adalah suprastrukturnya partai politik. Elite-elite partai politik perlu melakukan 1) Re-Ideologisasi Pancasila. Walaupun saat ini Partai politik tidak menganut asas tunggal lagi. Pancasila harus tetap menjadi ideologi negara. Semua Partai politik harus berpijak kepada Pancasila.

2) Re-Konseptualisasi, “Kalau begitu partai politik saya akan saya bangun dengan cara..” . Walaupun partai berbeda tetapi tujuan sama. Walaupun cara yang berbeda tetapi tujuan yang sama. Setiap elite politik harus saling mengingatkan kita berpolitik adalah berpolitik Pancasila. Pekerjaan mengingatkan adalah pekerjaan yang paling berat tetapi harus dilakukan. Ketika partai politik sendiri-sendiri, Pancasila akan buyar. 3) Re-Instrumenisasi, bagaimana struktur partai politik itu dibangun. Kita harus melihat pendidikan politik masing-masing partai dari “*what a comunality among?*” Semua berpijak di kesamaan itu yaitu ideologi Pancasila.

### c. Kompetensi Politik Minimal bagi Masyarakat

Terkait kompetensi politik yang harus dimiliki dan dipahami oleh masyarakat adalah 1) Politik sebagai seni. Masyarakat tidak perlu paham tentang politik sebagai ilmu. 2) Politik itu sebagai teknik sebagai cara kerja. 3) Politik sebagai etik. Pendidikan politik bagi masyarakat pertama-tama yang harus diajarkan adalah 1) politik sebagai etik, 2) politik sebagai budaya kehidupan, dan terakhir 3) baru politik sebagai teknik. Selama ini mayoritas elite politik mengajarkan “marilah kita memilih satu”. Seharusnya elite politik mengajarkan tentang hidup bermasyarakat, mengapa kita hidup bersama? Mengapa perlu ada pemimpin?

Menurut Winataputra Prof Baren pernah menulis buku dalam bahasa Belanda didalam bukunya didalam berpolitik, harus dimaknai sebagai politik adalah etik dan politik sebagai teknik. Kondisi perpolitikan gaduh karena para politisi menggunakan politik sebagai teknik. *How to get power, how to use power, how to defeat other friends*, bagaimana mengalahkan, bagaimana mendapatkan kekuasaan, menurut prof Baren bangun politik sebagai etik dahulu. Mengapa kehidupan politik kita kacau balau karena yang elite politik mendahulukan teknik, bagaimana supaya saya terpilih. Saat ini sistem pemilu kita adalah proporsional terbuka, antar elite politik atau caleg dalam partai politikpun saling berebut, berkompetisi, sehingga terjebak didalam pertikaian, begitu temannya terpilih, silaturahmi putus.

Politik etik adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dilupakan karena kita tergilagila dengan demokrasi liberal “*one man one vote*”. Sila keempat Pancasila tidak mendorong kepada *one man one vote*. Orde reformasi, yang seharusnya melahirkan format sistem politik yang ideal berdasarkan Pancasila tetapi lebih mengarah kepada konsep-konsep demokrasi liberal. Kita mencaci Amerika tetapi jiwanya diambil utuh. Kesimpulannya kita jangan terfokus pada pendidikan politik yang struktural tetapi kepada pendidikan politik yang fungsional, yang pendekatannya horizontal, bukan vertikal.